

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pelapor dan karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus dimasukkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan LKPD disusun berdasarkan SAP”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Laporan Keuangan Daerah adalah “laporan yang disusun oleh pemerintah daerah dan wajib diatur dalam bentuk tertentu”. Laporan keuangan daerah memberikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas daerah untuk periode tertentu. laporan keuangan daerah yang baik harus mengikuti prinsip akuntansi yaitu, transparansi, keterbukaan, akurasi, keandalan dan konsistensi. Laporan keuangan daerah harus disusun secara teratur dan tepat waktu serta diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh BPK.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:146) Kualitas laporan keuangan daerah merupakan:

hasil dari proses identifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi keuangan yang dilakukan entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan.

Sedangkan menurut Ifa Ratifah (2012:30) “Kualitas laporan keuangan daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan”. BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dalam rangka untuk memberikan opini (Pendapat) atas kewajaran suatu informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Liza Rahayu dkk, (2014) Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dapat berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini/Tidak Memberi Pendapat atau *Disclaimer*.

Provinsi Sumatera Selatan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK 8 kali berturut-turut mulai dari tahun 2014-2021 (<https://dprd.sumselprov.go.id>, 2022). Namun pada tahun 2021 masih ada kabupaten yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) salah satunya adalah kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mengatakan LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 gagal mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WDP atas LKPD Tahun 2021 ini merupakan suatu penurunan bagi Kabupaten Musi Banyuasin karena pada lima tahun sebelumnya Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan predikat WTP. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 hasil pemeriksaan BPK di bawah ini:

Tabel 1. 1
Opini BPK atas LKPD Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2021

| No. | Nama Pemda | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| 1. | Kabupaten OKU | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Kabupaten OKU Timur | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 3. | Kabupaten OKU Selatan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 4. | Kabupaten OKI | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP-PSH |
| 5. | Kabupaten Muara Enim | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 6. | Kabupaten Lahat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 7. | Kabupaten Musi Rawas | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 8. | Kabupaten Musi Banyuasin | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WDP |
| 9. | Kabupaten Banyuasin | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 10. | Kabupaten Empat Lawang | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 11. | Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir | WTP | WDP | WTP | WTP | WDP | WTP-PSH |
| 12. | Kabupaten Musi Rawas Utara | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP-PSH |

sumber:<https://sumsel.bpk.go.id>

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa LKPD Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan dari WTP menjadi WDP. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan proses evaluasi lelang atas 90 paket pekerjaan tidak berpedoman pada Dokumen Pemilihan, indikasi persaingan tidak sehat antar peserta lelang, dan pokja pemilihan mendapatkan arahan untuk memenangkan salah satu penyedia barang/jasa. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan 93 paket pekerjaan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan menunjukkan terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, tidak sesuai kondisi senyatanya, dan/atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 51.559.515.647,22. (<https://mubakab.go.id>).

Menurut Erlina (2013:6) pada dasarnya “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, suatu transaksi atau kejadian keuangan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD”. Dengan adanya SAKD diharapkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengimplementasikannya sehingga pemerintahan daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anwar Nasution (2009) mengatakan bahwa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, penerapan suatu standar dan sistem akuntansi sangat diperlukan sehingga pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Selain dari pada itu kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya dalam penyusunan laporan keuangan daerah diperlukan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang handal. Hal inilah yang menarik peneliti untuk mengambil sistem akuntansi keuangan daerah sebagai faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah dengan merujuk pada penelitian terdahulu yaitu Asih dan Windika (2021) dengan hasil penelitian bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya yaitu Wulandari

dan Rahmat (2021) dengan hasil penelitian bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor kedua yang menjadi pertimbangan peneliti yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Intern. Berdasarkan PP N0.60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern merupakan:

Suatu proses menyeluruh dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang cukup untuk mencapainya tujuan organisasi melalui operasi yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset pemerintah dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Peneliti mengambil faktor ini karena merujuk pada penelitian terdahulu yaitu Oktarida, dkk (2019) dengan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putra dan Halmawati (2022) dengan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Warjiyono dkk (2021) menjelaskan bahwa Kapasitas adalah kemampuan seseorang atau individu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan sumber daya manusia didefinisikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari orang-orang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Menurut Prameswary (2015:4) “Kapasitas sumber daya manusia mengacu pada kualitas pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu, atau kemampuan potensial untuk menghasilkan barang, jasa, dan kemampuan terintegrasi dari pikiran dan kekuatan fisik seseorang”. Untuk mencapai terciptanya kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang terbaik untuk menunjang tanggung jawab terhadap laporan keuangan daerah. penelitian terdahulu yang dilakukan Asih dan Pratiwi (2021) dengan hasil penelitian bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penelitian Mustaqmah, dkk (2022) dengan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “pemerintah daerah wajib memanfaatkan serta mengikuti perkembangan teknologi informasi, mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, serta transparansi lembaga keuangan daerah”. Menurut Zakiyudin (2011:15) “Sistem informasi manajemen daerah adalah informasi manajemen yang menggambarkan ketersediaan sekumpulan rangkaian data yang relatif lengkap dan disimpan untuk menyediakan informasi untuk menjalankan operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan organisasi”. Program SIMDA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dimana dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan, yaitu sistem yang mampu mengelolah data dan menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Faktor ini juga peneliti ambil sebagai faktor yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ananda dan Sari (2020) dengan hasil bahwa SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaqmah dan Putri (2020) dengan hasil penelitian bahwa SIMDA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa SAKD, SPI, kapasitas SDM, Penerapan SIMDA dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, tetapi dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa masih ada perbedaan hasil penelitian disetiap daerah yang berbeda meskipun dengan variable independen yang sama. Perbedaan tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Di tempat pengambilan sampel yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “**Determinan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan ?
4. Apakah penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan ?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini agar dapat terfokus dalam pembahasan yang telah ditentukan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen daerah, dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh OPD kabupaten Musi Banyuasin 2023.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup yang dijelaskan pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten musi banyuasin.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten musi banyuasin
3. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten musi banyuasin.
4. Pengaruh penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten musi banyuasin.
5. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), sistem pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten musi banyuasin.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, bahan bacaan bagi para ilmuwan, serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.